

**STAKEHOLDERS MAPPING PENGELOLAAN WISATA TELAGA MENJER
DESA MARON KECAMATAN GARUNG KABUPATEN WONOSOBO**

Ratih Widya Astuti, Retno Sunu Astuti, Amni Zarkasyi Rahman
Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 74605407
Laman : www.fisip.undip.ac.id Pos-el : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Menjer Lake is a natural tourist attraction located in Maron Village, Garung District, Wonosobo Regency. Compared to other tourist attractions in Wonosobo Regency, Telaga Menjer is one of the tourist attractions that experiences instability in the number of visitors each year, is less attractive to tourists, and has not been able to contribute optimally to Wonosobo Regency's PAD. The aim of this research is to identify stakeholders and their roles in the management of Menjer Lake. This research uses qualitative research methods with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The research results show that there are 3 stakeholders involved in this management, namely the government, the private sector or business world, and the community. The Maron Village Government acts as the implementer together with the Maron Village Karang Taruna, Bumdes Sumber Lancar, Wonosobo Regency Tourism and Culture Office, and the Fishermen's Group. The role of policy creator and coordinator is carried out by the Maron Village Government, the Wonosobo Regency Tourism and Culture Office, and PT Indonesia Power. The Fishermen and Investors Group also acted as facilitators together with the Maron Village Youth Organization and the Wonosobo Regency Tourism and Culture Office. The role of the accelerator is carried out by PT Indonesia Power. Based on the power versus interest analysis, the context setter stakeholders consist of the Maron Village Government and the Wonosobo Regency Tourism and Culture Office. Players consist of Karang Taruna Maron Village, Bumdes Sumber Lancar, and PT Indonesia Power. Subjects consist of Investors and Fishermen Groups.

Keywords : Identification, Management, Roles, Stakeholders

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa, salah satunya pada sektor pariwisata. Pariwisata menjadi salah satu sektor yang dapat menopang sektor yang lain, dapat mendorong dan meningkatkan pembangunan, menciptakan berbagai usaha

baru, serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menegaskan bahwa pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, dan

pemerintah. Pengelolaan pariwisata merupakan suatu upaya pemanfaatan hingga pendayagunaan potensi pariwisata yang berorientasi terhadap kepentingan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan pariwisata perlu dilakukan untuk menyetarakan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan pelayanan kepada semua wisatawan, serta memberikan perlindungan terhadap lingkungan dan pelestarian keberagaman budaya.

Pengelolaan pariwisata membutuhkan kerjasama dan kolaborasi dengan beberapa *stakeholder*, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi wisata yang cukup besar baik bahkan menjadi destinasi wisata unggulan, baik wisata alam, wisata religius, wisata sejarah, wisata kuliner, maupun wisata kebudayaan. Salah satu destinasi wisata di Kabupaten Wonosobo yaitu Telaga Menjer.

Telaga Menjer menjadi salah satu destinasi wisata alam di Kabupaten Wonosobo yang terletak di Desa Maron Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo.

Telaga Menjer menjadi telaga terluas di kaki pegunungan Dieng dengan luas sekitar 70 hektare dan kedalaman kurang lebih 45 meter. Telaga Menjer selain sebagai objek wisata alam, juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Keindahan alam yang dimiliki menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung ke Telaga Menjer.

Tabel 1. Jumlah Wisatawan dan Pendapatan Wisata Telaga Menjer Tahun 2017-2019

	Jumlah Wisatawan	
	Wisnu	Wisman
2017	26.300	-
2018	18.794	-
2019	27.635	-
Pendapatan	230.936.200 (1,7%)	

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, 2017-2019 (Diolah Peneliti)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 2017-2019, wisata Telaga Menjer mengalami peningkatan dan penurunan jumlah kunjungan wisatawan yang tidak stabil, dengan jumlah kunjungan tidak mencapai 30.000 wisatawan setiap tahunnya seperti wisata air yang lain di Kabupaten Wonosobo. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa di Telaga Menjer selama tahun 2017-2019 tidak dikunjungi wisatawan mancanegara sama sekali, dan belum bisa berkontribusi secara maksimal terhadap PAD, yakni selama 2017-2019 hanya dapat berkontribusi sebesar 1,7% dari total PAD Kabupaten Wonosobo.

Pengelolaan wisata Telaga Menjer tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja, namun juga menjadi tanggungjawab semua *stakeholder*. Dalam pelaksanaannya, *stakeholder* yang terlibat belum sepenuhnya mengelola dan bertanggungjawab dengan baik, bahkan masih ditemui juga konflik kepentingan antar *stakeholder* yang terlibat. Salah satu contohnya yaitu Pemerintah Desa Maron dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo yang belum bersinergi dan berintegrasi dalam melaksanakan pengelolaan tersebut, sehingga berpengaruh terhadap pengelolaan yang dilakukan.

Desa Maron memiliki berbagai komunitas yang bergerak dalam pengelolaan pariwisata, tetapi dalam pelaksanaannya belum semua komunitas tersebut memperoleh peran yang sama pada pengelolaan pariwisata tersebut. Salah satunya Pokdarwis Desa Maron tidak berpartisipasi dalam pengelolaan objek wisata Telaga Menjer, karena pengelolaan pada objek wisata tersebut mayoritas dilakukan oleh Karang Taruna Desa Maron dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo (Afni, 2021).

Penelitian ini berfokus pada peran *stakeholder* dan *stakeholders mapping* terhadap seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan objek wisata Telaga Menjer Desa Maron

Kabupaten Wonosobo. Secara lebih spesifik, penulis akan menguraikan peran dan mengidentifikasi hal-hal yang menyebabkan timbulnya ketidakmerataan peran para pemangku kepentingan yang terlibat, serta melakukan analisis *stakeholders mapping* dengan mengambil kasus semua *stakeholders* yang terlibat dalam melakukan pengelolaan pada objek wisata Telaga Menjer.

Pengelolaan Telaga Menjer tentu menjadi tanggung jawab bersama, termasuk seluruh *stakeholder* yang terlibat, tak terkecuali pemerintah. Peran para *stakeholder* tersebut perlu menjadi perhatian berkaitan dengan permasalahan yang terjadi, dalam hal ini dapat dikatakan setiap *stakeholder* pasti memiliki tanggung jawab dan peran yang berbeda-beda dalam mengelola Telaga Menjer. Maka muncul pertanyaan “Bagaimana pemetaan *stakeholder* dalam pengelolaan wisata Telaga Menjer Desa Maron Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo”.

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Hidayah, Hutagalung, dan Hermawan (2019) dengan judul “Analisis Peran *Stakeholder* dalam Pengembangan Objek Pariwisata Alam dan Sejarah di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu”, yang membagi *stakeholder* yang terlibat menjadi 3 yaitu masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Riesti Triyani dan Indah Susilowati (2019) dengan judul “Analisis Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir Berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul”, yang mengklasifikasikan *stakeholder* menjadi 3 terdiri dari *stakeholder* kunci, utama, dan pendukung yang bertindak sebagai koordinator, fasilitator, dan pelaksana; serta memetakan *stakeholder* menjadi subjek, pemain, aktor, dan penonton.

Penelitian ini juga merujuk pada penelitian yang lainnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Riska Destiana, dkk (2020) dengan judul “Analisis Peran *Stakeholders* dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau”, yang mengelompokkan *stakeholder* menjadi *stakeholder* primer, kunci, dan sekunder; serta perannya sebagai policy creator, koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada kajian yang dititikberatkan pada mengeksplorasi *stakeholders* yang terlibat, peran, kepentingan, dan pengaruh *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan objek wisata Telaga Menjer.

KAJIAN TEORI

A. Stakeholder

Freeman (1984) mendefinisikan *stakeholder* sebagai pihak yang terpengaruh oleh kebijakan dan pihak yang dapat mempengaruhi kebijakan (Lembaga Administrasi Negara, 2015 : 101).

Menurut Wibisono (2007), *stakeholder* didefinisikan sebagai suatu pihak atau kelompok yang berkepentingan secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi atau dipengaruhi berdasarkan kegiatan dan keberadaan perusahaan (A.Hidayah et al., 2019 : 57).

Stakeholder atau pemangku kepentingan merupakan kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan untuk mencapai kesejahteraan dan keberlangsungan organisasi. *Stakeholders* meliputi seluruh pihak yang berkaitan dalam pengelolaan sumber daya.

Menurut Maryono, dkk (2005) *stakeholders* dibagi menjadi 3 kelompok yaitu :

1. *Stakeholder* primer, merupakan *stakeholder* yang terdampak secara langsung dari suatu rencana serta memiliki keterkaitan kepentingan langsung dengan kegiatan tersebut.
2. *Stakeholder* kunci, adalah mereka yang mempunyai kewenangan legal dalam aspek pengambilan keputusan atau pihak yang memiliki pengaruh kuat dan penting berkaitan kebutuhan dan

perhatian terhadap kelancaran suatu kegiatan yang dilakukan.

3. *Stakeholders* sekunder atau pendukung, adalah *stakeholder* yang tidak berkepentingan langsung terhadap suatu rencana, namun mempunyai kepedulian besar terhadap proses pengembangan.

B. Stakeholders Mapping

Stakeholders mapping adalah salah satu proses yang memiliki urgensi cukup tinggi dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis. WHO (2007) mendefinisikan *stakeholders mapping* adalah sebuah teknik yang bisa dipergunakan untuk mengidentifikasi dan menilai kepentingan dari pihak-pihak kunci, kelompok, atau institusi yang dapat memberikan pengaruh terhadap keberhasilan dari sebuah kegiatan.

Menurut *Business for Social Responsibility* (BSR) (2011), *stakeholders mapping* yaitu kombinasi antara proses, penelitian, dan pembahasan yang mendeskripsikan sudut pandang berulang-ulang untuk menetapkan urutan kunci dari semua *stakeholder* yang ada.

Pemetaan *stakeholders* diperlukan untuk menganalisis tujuan utama suatu permasalahan atau isu-isu terkait, serta untuk lebih mengetahui kegiatan identifikasi *stakeholder* diperlukan guna lebih mengetahui kegiatan identifikasi *stakeholder* yang dilakukan.

Terdapat beberapa model pemetaan *stakeholders* diantaranya *triple helix*, *quadra helix*, dan *penta helix*. Konsep *triple helix* melahirkan suatu konsep hubungan yang komprehensif antara ilmu pengetahuan, sektor industri atau perdagangan dan sektor publik. Sementara *quadra helix* ditambah satu *stakeholders* lain yaitu masyarakat madani (*civil society*), dan *stakeholders* pada konsep *penta helix* disempurnakan menjadi lima yaitu dengan menambah media massa (*mass media*) (Astuti et al, 2020 : 100-105).

C. Teknik Stakeholders Mapping

Dalam melakukan analisis *stakeholders mapping*, terdapat beberapa instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan analisis, diantaranya :

1. *Stakeholder Issue Interrelationship Diagrams* (Teknik yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis hubungan *stakeholder* dengan berbagai isu kebijakan dan hubungan satu *stakeholder* dengan *stakeholder* lainnya).
2. *Problem-Frame Stakeholder Map* (Teknik analisis pemetaan *stakeholders* yang digunakan dengan tujuan memahami definisi permasalahan atau isu sehingga teknik ini dapat membantu membangun koalisi pemenang).
3. *Power Versus Interest Grid* (Matriks *power versus interest grid* digunakan

untuk menentukan sejumlah kelompok kepentingan dan kelompok yang mempunyai kewenangan dalam suatu isu tertentu. Menurut Bryson dalam Hidayah et al (2019 : 58) peran *stakeholder* dapat dianalisis dimulai menyusun *stakeholder* pada matriks dua kali dua menurut minat (*interest*) *stakeholder* terhadap suatu masalah dan kekuasaan (*power*) *stakeholder* dalam mempengaruhi masalah tersebut. Matriks *power versus interest grid* membagi *stakeholder* menjadi empat meliputi *context setter*, *players*, *subject*, dan *crowd*).

D. Peran Stakeholder

Peran merupakan seperangkat hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh seseorang yang mempunyai status tertentu. Robbins dan Hummels mengartikan peran sebagai satu set pola perilaku yang diharapkan dapat dihubungkan dengan seseorang yang berada pada posisi tertentu di kesatuan sosial (Adnyana & Mohktar, 2019 : 15).

Menurut Nugroho (2014) dalam program pembangunan, berdasarkan peranannya, *stakeholders* dikelompokkan menjadi empat yaitu :

1. *Policy creator*, yaitu *stakeholder* yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan..

2. Koordinator, yaitu *stakeholder* yang berperan mengkoordinasikan *stakeholder* lain yang terlibat.
3. Implementor, yaitu *stakeholder* yang berperan melaksanakan kebijakan termasuk kelompok sasaran.
4. Fasilitator, yaitu *stakeholder* sebagai fasilitator yang berperan memberikan fasilitas dan mencukupi kebutuhan kelompok sasaran.
5. Akselerator, *stakeholder* yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, dengan situs penelitian di wisata Telaga Menjer Desa Maron, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball*. Sumber data diperoleh melalui data primer dan data sekunder, dengan jenis data berupa data kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun instrumen yang digunakan untuk memetakan *stakeholders* dalam penelitian ini menggunakan matriks *power versus interest grid*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi *Stakeholders*

Pengelolaan wisata Telaga Menjer melibatkan beberapa *stakeholder*, baik dari pemerintah, swasta, maupun komunitas masyarakat. Terdapat tujuh *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan Telaga Menjer, meliputi Pemerintah Desa Maron, Karang Taruna Desa Maron, Bumdes Sumber Lancar Desa Maron, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, PT Indonesia Power, Kelompok Nelayan dan Investor (Pemodal). Sesuai dengan pengelolaan yang dilaksanakan di lapangan, yaitu bahwa dalam objek wisata Telaga Menjer terdapat dua pengelolaan di sebelah timur dan barat, ketujuh *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan Telaga Menjer tersebut juga terbagi menjadi dua yaitu pada wisata Telaga Manjer sebelah timur dan barat.

Penelitian ini mengidentifikasi *stakeholder* menjadi tiga, yang menurut Maryono, dkk (2005) identifikasi *stakeholder* dapat dikelompokkan menjadi *stakeholder* primer, *stakeholder* kunci, dan *stakeholder* sekunder.

1. *Stakeholder* Primer

Menurut Maryono, dkk (2005) *stakeholder* primer merupakan *stakeholder* yang terkena dampak secara langsung baik dampak positif maupun negatif dan berkepentingan langsung dalam kegiatan tersebut. Dalam pengelolaan wisata Telaga

Menjer, *stakeholder* primer terdiri dari sektor pemerintah, swasta atau dunia bisnis, dan komunitas.

Sektor pemerintah meliputi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo. Keterlibatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo dalam pengelolaan wisata Telaga Menjer sebagai organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, memiliki kepentingan dan dampak secara langsung. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki sebagian lahan sekaligus sebagai pengelola di wisata Telaga Menjer sebelah barat, sehingga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki legalitas dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan pada pengelolaan tersebut. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga merasakan dampak dari pengelolaan tersebut, diantaranya yaitu memperoleh retribusi sebagai salah satu sumber untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan adanya *multiplayer effect* salah satunya peningkatan kunjungan wisatawan, adanya *spend of money*, dan peningkatan lama tinggal wisatawan.

Sektor swasta atau dunia bisnis meliputi PT Indonesia Power, Bumdes Sumber

Lancar Desa Maron, dan Investor atau Pemodal. PT Indonesia Power sebagai pemilik lahan secara mayor memiliki kepentingan yang sangat vital berkaitan dengan tupoksinya dalam bisnis kelistrikan yaitu operasional pembangkit listrik tenaga air. Dampak yang dirasakan PT Indonesia Power dengan adanya pengelolaan ini yaitu aset-aset PT Indonesia Power di Telaga Menjer dan lingkungan sekitarnya terjaga dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Bumdes Sumber Lancar Desa Maron dalam pengelolaan wisata Telaga Menjer menjadi *stakeholder* yang menaungi Karang Taruna dan Kelompok Nelayan, serta melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Bumdes. Dalam pengelolaan ini, Bumdes juga menjadi pengelola keuangan dan mendapatkan penghasilan dari pengelolaan tersebut. Sama halnya dengan Bumdes, investor atau pemodal di wisata Telaga Menjer diantaranya pemilik *homestay* di sekitar telaga, pemilik warung-warung sekitar, dan beberapa masyarakat yang turut membuat atraksi wisata juga berkepentingan dan berdampak langsung diantaranya meningkatkan ketertarikan wisatawan untuk mengunjungi objek wisata Telaga Menjer dan memperoleh penghasilan dari kegiatan yang dilakukan.

Komunitas meliputi Karang Taruna Desa Maron dan Kelompok Nelayan juga turut berkepentingan dalam pengelolaan tersebut. Karang Taruna sendiri sebagai person dalam pengelolaan tersebut menjadi *stakeholder* pelaksana secara langsung atau eksekutor di lapangan yang bertanggungjawab atas pengelolaan yang dilakukan. Kelompok Nelayan juga menjadi *stakeholder* yang dalam pengelolaan tersebut melaksanakan tugas dan fungsinya yang berfokus pada kebersihan Telaga Menjer dan lingkungan sekitarnya, fokus terhadap operasional perahu gethek dan pengelolaan karamba. Karang Taruna dan Kelompok Nelayan memperoleh penghasilan dari pengelolaan tersebut, bahkan adanya pengelolaan yang mereka lakukan juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan meningkatkan keamanan pengunjung.

2. Stakeholder Kunci

Maryono, dkk (2005) mendefinisikan *stakeholder* kunci yaitu *stakeholder* yang mempunyai kewenangan legal dalam pengambilan keputusan dan berpengaruh kuat berkaitan dengan kebutuhan dan perhatian terhadap kelancaran suatu kegiatan. *Stakeholder* kunci dalam pengelolaan wisata Telaga Menjer yaitu dari sektor swasta atau dunia bisnis yang meliputi PT Indonesia Power.

PT Indonesia Power sebagai pemilik lahan secara mayor tentu memiliki legalitas

dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan terhadap pengelolaan tersebut, termasuk dalam persetujuan perizinan atas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan *stakeholder* terkait dalam pengelolaan tersebut yang berada di tanah milik PT Indonesia Power agar nantinya tidak berpengaruh terhadap operasional pembangkit listrik tenaga air. PT Indonesia Power melalui CSRnya yang memberikan bantuan dana maupun fasilitas terhadap pengelolaan tersebut juga menjadi bukti bahwa PT Indonesia Power menjadi pihak yang berpengaruh cukup kuat dalam pemenuhan kebutuhan untuk kelancaran pengelolaan yang dilakukan.

3. *Stakeholder* Sekunder

Menurut Maryono, dkk (2005) *stakeholder* sekunder atau pendukung adalah *stakeholder* yang tidak berkepentingan secara langsung tetapi memiliki minat dan kepedulian terhadap pengelolaan yang dilakukan. *Stakeholder* pendukung dalam pengelolaan wisata Telaga Menjer yaitu Pemerintah Desa Maron.

Pemerintah Desa Maron tidak memiliki kepentingan dan dampak secara langsung, tetapi memiliki pengaruh dan power dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan dalam pengelolaan tersebut sesuai regulasi yang berlaku. Pemerintah Desa Maron mempunyai minat yang cukup besar terhadap pengelolaan Telaga Menjer.

Hal ini dapat dilihat dari harapan Pemerintah Desa Maron yang cukup besar terhadap pengelolaan yang dilakukan.

B. Matriks *Power Versus Interest Grid*

Analisis *stakeholder* pada penelitian ini menggunakan matriks *power versus interest grid*. Menurut Bryson dalam Hidayah et al (2019) analisis *stakeholder* dapat dimulai dengan menyusun *stakeholder* pada matriks dua kali dua menurut minat (*interest*) setiap *stakeholder* terhadap suatu masalah dan kekuasaan (*power*) *stakeholder* dalam mempengaruhi masalah tersebut. *Stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan Telaga Menjer dapat diklasifikasikan menurut nilai *power* dan *interest* yang dimiliki masing-masing *stakeholder*.

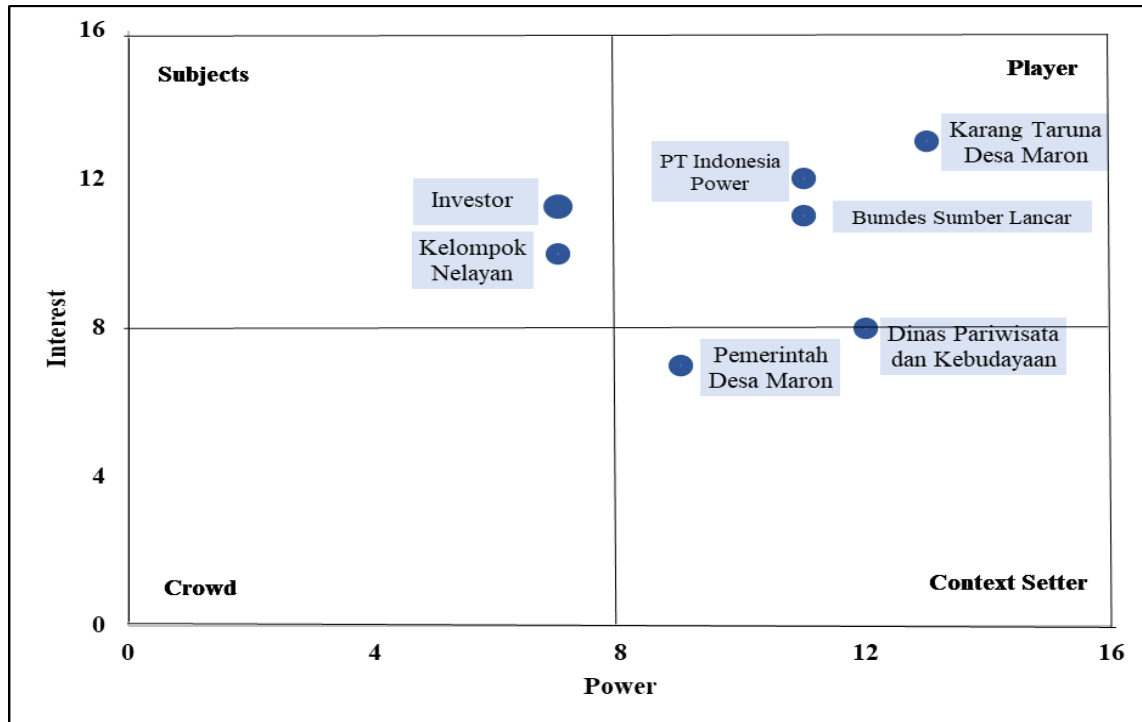
Power dan *interest* masing-masing *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan wisata Telaga Menjer perlu dipetakan dengan jelas. Golder (2005) berpendapat bahwa pemetaan *stakeholder* dapat mengidentifikasi ketertarikan para *stakeholder* terhadap kebijakan atau program; mengetahui potensi konflik atau risiko dari kebijakan; membangun relasi dengan *stakeholder*; serta dapat meminimalisir risiko kegagalan sebuah kebijakan.

Matriks *power versus interest grid* merupakan gambaran yang berasal dari penilaian *power* dan *interest* yang sudah

dilakukan. Matriks ini dibagi menjadi empat kuadran. Berikut matriks *power*

versus interest grid dalam pengelolaan Telaga Menjer.

Gambar 1.
Matriks *Power Versus Interest Grid* Pengelolaan Wisata Telaga Menjer



Sumber : Data Olahan Peneliti

Hasil analisis yang disajikan dalam bentuk matriks *power versus interest grid* tersebut menunjukkan bahwa dalam pengelolaan wisata Telaga Menjer berdasarkan *power* dan *interestnya*, terdapat *stakeholder* yang diklasifikasikan menjadi tiga meliputi *context setter*, *players*, dan *subject*.

1. *Context Setter*

Berdasarkan matriks *power versus interest grid* tersebut, Pemerintah Desa Maron dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo berada pada posisi *stakeholder* sebagai *context*

setter. *Context setter* merupakan *stakeholder* yang berkepentingan rendah, namun mempunyai *power* yang cukup tinggi.

Power Pemerintah Desa Maron dapat dilihat dari keterlibatannya dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan terkait pengelolaan tersebut bersama dengan *stakeholder* yang lain, salah satunya dengan PT Indonesia Power dalam membuat dan menyetujui MoU terkait pengelolaan tersebut sejak tahun 2017. Pemerintah Desa Maron juga memiliki *power* untuk membina kegiatan

masyarakat di wilayah administratifnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Pengelolaan tersebut dalam pelaksanaannya belum mampu berkontribusi terhadap pendapatan asli Desa Maron.

Power Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat dilihat dari keterlibatan dalam pengelolaan tersebut yang berfokus pada wisata Telaga Menjer sebelah barat sesuai dengan kepemilikan asetnya. Dinas Pariwisata juga berwenang untuk membuat kebijakan dan mengambil keputusan pada pengelolaan tersebut sesuai dengan tupoksinya sebagai organisasi perangkat daerah yang bergerak dalam urusan kepariwisataan. Pengelolaan Telaga Menjer ini belum menjadi prioritas kegiatan Dinas Pariwisata, sehingga kepentingan Dinas Pariwisata cukup rendah.

2. *Players*

Players merupakan *stakeholder* yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi dalam suatu kegiatan, sehingga dapat dikatakan sebagai *stakeholder* aktif. Berdasarkan matriks tersebut, dalam pengelolaan wisata Telaga Menjer, *stakeholder* yang berada pada posisi

players yaitu PT Indonesia Power, Karang Taruna Desa Maron, dan Bumdes Sumber Lancar.

PT Indonesia Power sebagai pemilikan mempunyai kewenangan dalam hal pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap pengelolaan Telaga Menjer. Semua kegiatan yang dilakukan di Telaga Menjer harus dengan sepengetahuan dan seizin dari PT Indonesia Power, serta terdapat pembatasan terhadap kegiatan yang dilakukan agar tidak merusak kelestarian alam dan tidak mengganggu operasional pembangkit listrik tenaga air. *Interest* PT Indonesia Power dalam pengelolaan Telaga Menjer salah satunya berkaitan dengan bisnis kelistrikan yang dijalankan yaitu operasional pembangkit listrik tenaga air. PT Indonesia Power juga memiliki kepentingan sosial berupa tanggung jawab mengalokasikan dana CSR untuk membantu kelancaran pengelolaan tersebut.

Bumdes Sumber Lancar Desa Maron dalam pelaksanaannya lebih berfokus pada objek wisata Telaga Menjer sebelah timur. Bumdes Sumber Lancar Desa Maron menjadi *stakeholder* yang menaungi Karang Taruna Desa Maron dan Kelompok Nelayan dalam pengelolaan tersebut. Bumdes Sumber Lancar juga menjadi pengelola keuangan pada pelaksanaan pengelolaan tersebut. Bumdes juga mendapatkan penghasilan dari pengelolaan

Telaga Menjer terkhusus Telaga Menjer sebelah timur.

Karang Taruna Desa Maron menjadi *stakeholder* pelaksana yang paling pokok di lapangan dari pengelolaan wisata Telaga Menjer khususnya Telaga Menjer sebelah timur. Karang Taruna sebagai pelaku utama di lapangan bertanggung jawab atas keberlangsungan pengelolaan Telaga Menjer, terlebih lagi mereka mendapatkan penghasilan dari pengelolaan tersebut. Karang Taruna juga bertanggung jawab atas kebersihan dan kelestarian Telaga Menjer, keamanan aset-aset PT Indonesia Power, serta keamanan pengunjung dan pengelola.

3. Subject

Subject merupakan *stakeholder* yang berkepentingan tinggi, namun memiliki pengaruh yang rendah. Sesuai dengan matriks tersebut, dalam pengelolaan wisata Telaga Menjer, *stakeholder* yang termasuk dalam *subject* yaitu Kelompok Nelayan dan Investor.

Kelompok Nelayan sebagai salah satu *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan Telaga Menjer yang berada dibawah naungan Bumdes Sumber Lancar Desa Maron memiliki tugas untuk menjaga kebersihan dan kelestarian Telaga Menjer, fokus terhadap operasional perahu *gethek* dan karamba, melakukan patroli keamanan telaga, serta mengalokasikan waktu berkegiatan masyarakat di Telaga Menjer.

Kelompok Nelayan juga memperoleh penghasilan dari operasional perahu *gethek*, dengan tetap melakukan kewajibannya menyetorkan penghasilannya tersebut sesuai persentase yang telah ditentukan kepada Bumdes Sumebr Lancar Desa Maron.

Investor atau pemodal dalam pengelolaan tersebut sebagai *stakeholder* yang turut terlibat dalam penyediaan fasilitas penunjang dan akomodasi diantaranya berupa penyediaan *homestay*, pedagang di warung-warung makan sekitar wisata Telaga Menjer sebelah timur, dan penyedia atraksi wisata berupa selfie area di wisata Telaga Menjer sebelah barat, sehingga dari kegiatan tersebut, para investor memperoleh penghasilan, dengan tetap harus menyerahkan sebagian penghasilannya kepada Bumdes Sumber Lancar Desa Maron sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Peran Stakeholders

Penelitian ini mengelompokkan peran *stakeholder* menjadi lima, yang menurut Nugroho (2014) meliputi *policy creator*, implementor, koordinator, fasilitator, dan akselerator.

1. Policy Creator

Dalam pengelolaan wisata Telaga Menjer, *policy creator* terdiri dari sektor pemerintah yang meliputi Pemerintah Desa Maron dan Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Wonosobo; serta sektor swasta atau dunia usaha meliputi PT Indonesia Power.

Pemerintah Desa Maron dalam pengelolaan yang dilakukan membuat kebijakan mengenai pengelolaan pariwisata di Desa Maron, salah satunya Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 sebagai upaya mendorong keberhasilan pengelolaan wisata Telaga Menjer. Pemerintah Desa Maron juga terlibat dalam pembuatan nota kesepakatan atau MoU sejak 2017 dengan PT Indonesia Power. Sama seperti Pemerintah Desa Maron, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo juga membuat kebijakan dan mengambil keputusan terkait pengembangan pariwisata di Kabupaten Wonosobo termasuk objek wisata Telaga Menjer, salah satunya Perencanaan Pengembangan KSPK Kejajar-Garung dan Sekitarnya Tahun 2020-2030.

PT Indonesia Power dari sektor bisnis membuat kebijakan sebagai pemilik lahan berkaitan dengan menyesuaikan kepentingannya yaitu operasional pembangkit listrik tenaga air.

2. Implementor

Implementor dalam pengelolaan wisata Telaga Menjer terdiri dari sektor pemerintah yang meliputi Pemerintah Desa Maron dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo; sektor bisnis atau dunia usaha meliputi Bumdes

Sumber Lancar Desa Maron; dan komunitas meliputi Karang Taruna Desa Maron dan Kelompok Nelayan.

Dari sektor pemerintah, Pemerintah Desa Maron sebagai implementor menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Bumdes yaitu sebagai pembina dan penasehat Bumdes salah satunya berkaitan dengan pengelolaan wisata Telaga Menjer ini. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo sebagai implementor mengelola sebagian lahan milik Pemerintah Daerah di wisata Telaga Menjer sebelah barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.

Bumdes Sumber Lancar Desa Maron dari sekro bisnis, mengelola keuangan semua penghasilan yang didapatkan dari unit usaha desa termasuk kegiatan pariwisata.

Karang Taruna Desa Maron dalam pelaksanaannya mengelola secara langsung atau eksekutor di wisata Telaga Menjer, sementara Kelompok Nelayan juga mengelola secara langsung, namun sesuai tugas dan kewajibannya berfokus pada pengelolaan karamba dan perahu *gethek*.

3. Koordinator

Dalam pengelolaan wisata telaga Menjer, koordinator terdiri dari sektor pemerintah yang meliputi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo;

dunia usaha atau swasta meliputi PT Indonesia Power dan Bumdes Sumber Lancar Desa Maron; serta dari komunitas meliputi Karang Taruna Desa Maron.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo melaksanakan koordinasi dengan *stakeholder* lain berkaitan dengan pengelolaan wisata Telaga Menjer diantaranya melalui rapat koordinasi rutin setiap bulannya. Sementara PT Indonesia Power sebagai pemilik lahan dan aset melakukan koordinasi secara berkala agar tidak mempengaruhi kepentingan operasional pembangkit listrik dilakukan. Bumdes Sumber lancar berkoordinasi dengan *stakeholder* yang lain salah satunya berkaitan dengan pengelolaan keuangan, dan Karang Taruna Desa Maron yang paling aktif dalam berkoordinasi dan bekerjasama baik dengan *stakeholder* lain dalam pengelolaan Telaga Menjer, maupun *stakeholder* lain diluar pengelolaan yang dilakukan.

4. Fasilitator

Fasilitator dalam pengelolaan wisata Telaga Menjer terdiri dari sektor pemerintah yang meliputi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo; sektor swasta atau dunia usaha meliputi investor; dan komunitas meliputi Karang Taruna dan Kelompok Nelayan.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo memberikan fasilitas pokok dan penunjang untuk

mendukung kegiatan pariwisata di Telaga Menjer diantaranya toilet, mushola, tempat parkir, ruang rapat, dan panggung. Investor turut memberikan fasilitas pengunjung dan akomodasi untuk pengunjung salah satunya berupa *homestay* dan atraksi wisata di Telaga Menjer sebelah barat. Sama seperti investor, Karang taruna juga memberikan dan mengembangkan fasilitas pendukung di Telaga Menjer, bahkan secara mandiri, salah satunya berkaitan dengan jalan untuk aksesibilitas ke lokasi wisata. Kelompok Nelayan juga turut memberikan fasilitas penunjang berupa perahu *gethek* untuk membantu wisatawan mengelilingi telaga.

5. Akselerator

Akselerator yaitu *stakeholder* yang berperan menunjang dan berkontribusi agar program yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai sasaran. Adapun akselerator dalam pengelolaan wisata Telaga Menjer dari sektor swasta, yaitu PT Indonesia Power.

PT Indonesia Power memberikan bantuan dana melalui CSRnya untuk dipergunakan sebaik mungkin dalam mendorong keberhasilan pengelolaan Telaga Menjer. Salah satu bukti dari adanya bantuan CSR PT Indonesia Power yaitu dana yang dipergunakan untuk membangun fasilitas pokok berupa mushola di wisata Telaga Menjer sebelah timur.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa setiap *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan objek wisata

Telaga Menjer memiliki peran yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Hampir semua *stakeholder* melaksanakan lebih dari satu peran, namun peran paling banyak dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo yaitu tidak hanya sebagai *policy creator*, tetapi juga memiliki peran sebagai koordinator, implementor, dan fasilitator. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat tumpang tindih peran yang dilakukan oleh *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan wisata Telaga Menjer, yaitu hampir semua *stakeholder* melaksanakan lebih dari satu peran dalam pengelolaan tersebut. Adanya tumpang tindih peran tersebut menyebabkan peran yang dijalankan oleh masing-masing *stakeholder* tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Salah satunya dapat dilihat dari koordinasi yang dilaksanakan oleh beberapa *stakeholder* belum berjalan dengan baik karena koordinasi yang dilakukan hanya sesuai dengan kebutuhan sektor masing-masing saja, sementara pariwisata merupakan kegiatan yang menghubungkan berbagai sektor dan wilayah.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan wisata Telaga Menjer ini juga didominasi oleh peran dunia bisnis yaitu PT Indonesia Power sebagai pemilik lahan secara mayor di Telaga Menjer dan

kepentingan yang dijalankan lebih besar dari kepentingan-kepentingan yang lain yaitu untuk operasional pembangkit listrik tenaga air. Semua kegiatan yang dilakukan di Telaga Menjer harus dengan izin PT Indonesia Power. Hal ini menjadi sebuah kewajaran apabila wisata Telaga Menjer tidak dapat berkembang seperti halnya objek wisata lain di Kabupaten Wonosobo, karena tidak hanya terdapat tumpang tindih peran masing-masing *stakeholder*, namun juga dalam pelaksanaannya didominasi oleh pihak dunia bisnis.

KESIMPULAN

Pengelolaan objek wisata Telaga Menjer termasuk pengelolaan triple helix yang memadukan keterlibatan tiga *stakeholder* terdiri dari pemerintah, dunia usaha, dan komunitas. *Stakeholder* tersebut diklasifikasikan menjadi tiga yaitu *stakeholder* primer, *stakeholder* kunci, dan *stakeholder* sekunder atau pendukung. Adapun identifikasi *stakeholder* berdasarkan matriks *power versus interest grid* mengklasifikasikan *stakeholder* dalam pengelolaan objek wisata Telaga Menjer menjadi tiga, meliputi *context setter*, *players*, dan *subject*. Peran *stakeholder* diklasifikasikan menjadi lima, meliputi *policy creator*, implementor, koordinator, fasilitator, dan akselerator.

Peran masing-masing *stakeholder* dalam pengelolaan wisata Telaga Menjer

belum dijalankan dengan baik. Hal ini dapat dilihat masih adanya tumpang tindih peran pada setiap *stakeholder* yaitu satu *stakeholder* yang melaksanakan lebih dari satu peran, dan pengelolaan wisata Telaga Menjer ini juga masih didominasi oleh pihak swasta atau dunia usaha yaitu PT Indonesia Power sebagai pemilik lahan dan berkepentingan sangat besar untuk operasional pembangkit listrik tenaga air, sehingga wisata Telaga Menjer tidak dapat berkembang dengan baik secara maksimal.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai *stakeholders mapping* dalam pengelolaan objek wisata Telaga Menjer, berikut adalah saran berdasarkan hasil penelitian.

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang bersifat proaktif antara *stakeholder* yang satu dengan yang lain dengan penanggung jawab yang jelas, sehingga meminimalisir adanya tumpang tindih peran dan tugas diantara *stakeholder* terkait.
2. Membentuk organisasi atau lembaga masyarakat yang berfokus terhadap pengelolaan wisata Telaga Menjer sebagai wadah terintegrasinya semua *stakeholder* yang terlibat.
3. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian terkait peran dan tanggung jawab sebagai *stakeholder* yang terlibat

dalam pengelolaan wisata Telaga Menjer dengan menyamakan persepsi dan tujuan semua *stakeholder* terhadap pengelolaan yang dilakukan.

4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi berkala dengan semua *stakeholder* secara terhadap pengelolaan wisata Telaga Menjer.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Hidayah, N., Hutagalung, S. S., & Hermawan, D. (2019). Analisis Peran *Stakeholder* Dalam Pengembangan Objek Pariwisata Alam Dan Sejarah Di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 7(1), 55. <https://doi.org/10.31289/publika.v7i1.2179>
- Adnyana, I. P. C. P., & Mohktar, M. S. (2019). Peran *Stakeholder* Dalam Pemberdayaan Petani Tebu Di Kabupaten Dompu Provinsi Ntb. *SOCA: Jurnal Sosial, Ekonomi Pertanian*, 13(1), 14. <https://doi.org/10.24843/soca.2019.v13.i01.p02>
- Afni, I. N. (2021). *Stakeholders Mapping* Dalam Pelaksanaan Community Tourism Collaborative Governance (CTCG) Di Desa Maron Wonosobo *Stakeholders Mapping in The Implementation of Community Tourism Collaborative Governance (CTCG) in Maron Village Wonosobo secara konsensus. Jurnal Litbang*, 19(2), 123–136.
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik. Cetakan Pertama. Semarang : Program Studi Doktor Administrasi Publik

- Destiana, R., Kismartini, K., & Yuningsih, T. (2020). Analisis Peran *Stakeholders* Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 8(2), 132–153.
<https://doi.org/10.47828/jianaasian.v8i2.18>
- Dewi, A. D. K., Suryoputro, A., & Sriatmi, A. (2020). Pemetaan *Stakeholder* Program Pencegahan Fraud Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Kota Semarang. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 238–245.
<https://doi.org/10.14710/mkmi.19.3.238-245>
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo. Data Pengunjung dan Pendapatan Tahun 2017-2019. Diakses melalui <https://disparbud.wonosobokab.go.id>
- Handayani, F., & Warsono, H. (2017). ANALISIS PERAN *STAKEHOLDERS* DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI KARANG JAHE DI KABUPATEN REMBANG. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(3), 1–13.
- Hidayat, N. C., Setijaningrum, E., & Asmorowati, S. (2020). Analisis Pemangku Kepentingan Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Kabupaten Jember. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 188–201.
<https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.118>
- Lembaga Administrasi Negara. (2015). Modul Pelatihan Analisis Kebijakan. *Pusaka Lembaga Administrasi Negara RI*, 1–350.
- Pemerintah Kabupaten Wonosobo. (2021). *RPJMD Kabupaten Wonosobo 2021-2026*. <https://wonosobo.kab.go.id>
- Susilo, D. A., Astuti, R. S., & Priyadi, B. P. (2018). *Stakeholder Analysis* Dalam Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Natapraja*, 7(1), 2406–9515.
<https://journal.uny.ac.id/index.php/natapraja>
- Triyanti, R., & Susilowati, I. (2019). Analisis Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir Berkelanjutan Di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 9(1), 23.
<https://doi.org/10.15578/jksekp.v9i1.7324>

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pariwisata Nasional

Peraturan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa